

Vol. I No. 3 Juli - September 2021

ISSN : 2775 - 2372

JURNAL MALAY

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM & BUDAYA



**PRODI (S1) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683 Fax. 061-6615683 Medan Estate 20371

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MTS. S AR RIDHO TANJUNG MULIA

Wenni Ratna Sari Siregar
ABSTRAK

Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang di buat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah di buat dapat berjalan dan di imlementasikan yaitu menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terahhir adalah melakukan eveluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al Qura'an, program Ektrakurikuler agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, Mutu pendidikan Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia mempunyai telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah di buat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stekholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia masih kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, ruang diskusi dan mushollah serta yang lainnya tidak membuat para sisiwa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah salalu membimbing dan memotivasi meraka dengan lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan perwujudan diri individu, dan bagi kehidupan suatu bangsa. Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan sebagai pendorong kemajuan suatu bangsa, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pembiayaan, sistem, kurikulum, dan lain sebagainya merupakan peningkatan mutu pendidikan, sehingga Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 6 juga menegaskan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan..¹

Sebagaimana tersebut dalam undang undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap.kratif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Maka dengan pendidikan itu perubahan akan nampak dalam proses perubahan pikiran manusia, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui karena pendidikan adalah suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, agama, dan khususnya bangsa indonesia agar tidak sampai tertinggal dengan bangsa lain, dan dalam mengelola pendidikan khususnya di suatu sekolah merupakan tugas kepala sekolah agar mutu pendidikan di sekolah berkualitas dengan meren-canakan program, dimulai dari merencana-kan kebutuhan SDM yang akan menjalan-kan tugas, merencanakan kebijakan berupa program kepala sekolah dan kurikulum yang akan dijalankan di sekolah. Dalam perencanaan ini kepala sekolah selalu melibatkan guru, PKS dan komite sekolah.

Peran kepala sekolah dalam meng-organisasikan program yaitu membuat struktur organisasi sekolah yang melibat-kan orang tua melalui komite sekolah, melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh sekolah,

¹ P3M STAIN Tulungagung et.al, "Ta'alum Jurnal Pendidikan Islam", (Tulungagung, volume 28, Nomor 1, 2005), hlm. 131

² Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang Undang SISDIKNAS* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal. 6

pembagian tugas seperti adanya PKS dan TU sesuai sesuai kemampuan guru baik di tingkat kelas maupun keterampilan yang mereka miliki.³

Sekolah merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membina kepribadian anak, melalui pembelajaran sesuai kurikulum yang berisikan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memperbaiki nasib hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan sekolah yang berkembang akan memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga tidak dapat diabaikan eksistensinya sebagai wadah untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya diharapkan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3).⁴

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia pembangunan, pendidikan tidak hanya terfokus pada kebutuhan material tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral dan spiritual yang luhur. Dalam hal ini kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan (political will) pemerintah, baik pusat maupun di daerah dan termasuk kebijakan kepala sekolah.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang menuntut pengelola pendidikan agar dapat membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan secara mandiri sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta mutu tenaga pendidikan sesuai dengan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud termasuk kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁵

Dalam dunia pendidikan di era globalisasi masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan dinegara kita adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk ahli pendidikan, bahwa masalah mutu pendidikan sebuah proses pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan bangsa dalam berbagai bidang. khususnya dalam mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih rendah.

Oleh karena itu, sekolah di tuntut dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terwujud kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan penyediaan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja guru dengan mengatur kegiatan kegiatan di sekolah yang di buat oleh kepala sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat berbagai faktor faktor yaitu. Menurut Fattah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: (1) kecukupan sumber sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar, (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu pengeluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap ,keterampilan dan nilai-nilai.⁶

³ Yogi Irfan Rosyadi dan Parrdjono, *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan : Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP I Cilawu Garut*, (Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Rusyani Hikmatul Rosyad, VI. 3 No .1Periode April 2015), hal.125

⁴ Depdiknas undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jakarta 2003

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3

⁶ Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2015) Hlm, 313

KAJIAN TEORI

Kebijakan Kepala Sekolah

Untuk meningkatkan suatu sekolah yang bermutu di perlukan suatu kebijakan yang tepat dengan membuat suatu program program sesuai dengan tujuan sekolah yaitu visi dan misi. Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah terjemahan dari kata "*wisdom*" yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat pengecualian artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak meungkin tadi, dengan kata lain dapat di kecualikan tetapi tidak melanggar aturan.⁷

Kamus besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya untuk manajemen dalam mencapai sasaran.⁸

Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Gamage dan Pang dalam kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang laus untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.⁹

Sedangkan Nichols dalam Syafaruddin kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan yang berulang ulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan aturan keputusan.¹⁰

Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.¹¹

Adapun menurut penulis, kebijakan adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah atau madrasah dalam mengambil suatu keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pengambilan keputusan atau kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu bagian terpenting dalam Manajemen. Tanpa adanya pengambilan keputusan atau kebijakan tidak ada kepemimpinan, maka manajemen tidak berfungsi sehingga untuk mencapai tujuan yang diinginkan tercapai dengan melangkah lebih maju ke masa depan..

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S. Ali Imran /3 : 159 yang berbunyi

*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹²

Dalam rangka melaksanakan dan menetapkan suatu kebijakan pendidikan pada sebuah sekolah perlu menggunakan berbagai macam model kebijakan pendidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat

⁷ Syafaruddin & Asrul, *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hal. 14

⁸ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung, Alfabeta, 2009) h. 94

⁹ *Ibid*, h. 75

¹⁰ Syafaruddin *Efektifitas Kebijakan Pendidikan :Konsep Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif* (Jakarta, PT Rineka Cipta 2008) h. 76

¹¹ Syaiful Sagala, *op Cit*. Hal 97-98

¹² Rahmad Hidayat dan Chandra Wijaya *Ayat Ayat Al Quran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan LPPPI, 2017),h. 175 176

terlaksana dengan baik. Adapun model pendekatan yang diperlukan dalam menetapkan suatu kebijakan pendidikan di sekolah antara lain :

1. Model Rasional murni yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional.
2. Model Ekonomi yaitu model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi, model keputusan berurutan yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif.
3. Model Ekperimentasl yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan keijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit.
4. Model memuaskan yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain dan
5. Model Optimal yaitu model yang mendasarkan pengambilan keputusan atas dasar gabungan beberapa metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat di terimah oleh semua pihak.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dalam membuat suatu kebijakan dengan menggunakan suatu model model kebijakan agar pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat di terimah oleh semua pihak berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah dibuatoleh kepala sekolah dengan melakukan kerjasama dengan baik antara seluruh komponen komponen sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dengan pendekatan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Subjek dalam Penelitian dilakukan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia, ini berada di Tanjung Mulia Kab.Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Penelitian ini tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Kebijakan Kepala Sekolah dalam di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia

Dari hasil temuan penelitian di atas, proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia dengan membuat suatu perencanaan /perumusan program kemudian bekerjasama dengan seluruh stekholder yang ada di sekolah tersebut menjalankan (implementasi program) dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program yang di buat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah(rapat) yaitu dengan membuat program Tahfizul Al-Qur'an, eksrakurikuler dll.

Sesuai dengan pernyataan Rusdiana, dalam buku Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi menyatakan bahwa Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang profesional di tuntutan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan yang telah dibuat tersebut.¹⁴

1. Mutu pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia

Sekolah Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah di buat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stekholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia masih kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, ruang diskusi dan mushollah serta yang lainnya tidak membuat para sisiwa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah salalu membimbing dan memotivasi meraka dengan lebih baik dan membuat suatu kebijakan atau program di sekolah berupa program Tahfizul Al-Quar'an, program Eksrakurikuler dll.

¹³ Syafaruddin, *op.Cit hal* 80

¹⁴ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung, Pustaka Setia. 2015).h.

Sesuai dengan pernyataan PP No.19 Tahun 2005 di sebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar pendidikan yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4). Oleh karena itu kualitas dan penjaminan kualitas dapat di pandang sebagai suatu inovasi dalam suatu pendidikan.¹⁵

2. Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kebijakan atau program pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia adalah membuat program Tahfizul Al-Quar'an, program Ektrakurikuler guna meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal. Yaitu Rapat secara formal dilakukan dengan Rapat Kerja, *Briefing*, Rapat Pimpinan serta rapat antara kepala sekolah dan guru-guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut.

Sesuai dengan pernyataan, Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono, mengemukakan bahwa putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika memenuhi berbagai persyaratan implementasi salah satunya adalah perlu adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga implementor. Koordinasi atau komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah berjalan rutin yaitu dengan adanya komunikasi terbuka antara sesama.¹⁶

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan yang ada untuk mendukung seluruh program dan kegiatan. Dukungan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas, multitalenta dan sudah bergelar Sarjana. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah, sekolah membutuhkan agen pelaksana dalam hal ini tenaga pendidik dan pendidik untuk melaksanakan kebijakan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen pelaksana. Dengan tingkat pendidikan yang mayoritas sudah bergelar sarjana memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Arif Rohman bahwa faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah faktor yang terletak pada personal pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang di buat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah di buat dapat berjalan dan di implementasikan yaitu menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al Qura'an, program Ektrakurikuler agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Mutu pendidikan Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia mempunyai telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah di buat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stekholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia masih kurang yaitu tidak

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jakarta.:Depdiknas

¹⁶ Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

¹⁷ Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

adanya perpustakaan sekolah, ruang diskusi dan mushollah serta yang lainnya tidak membuat para siswa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik.

3. Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia adalah sebelum kepala sekolah membuat kebijakan atau program kepala sekolah melakukan komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan dilakukan baik secara formal maupun informal Melalui Rapat Kerja, *Briefing*, Rapat Pimpinan, Rapat Wali Kelas, Rapat Guru Senior, Rapat Guru dan Karyawan, Rapat Dinas, Rapat Bidang Studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat sumber daya manusia (SDM) siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasana agar dapat mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al-Qur'an dan ekstrakurikuler. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia menjalankan sesuai dengan visi dan misi yang di buat dan sesuai dengan program yang di jalankan dan kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang baik dalam gaya kepemimpinannya yaitu selalu terbuka antara sesama dan demogratis.

4. Faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia ini, diantaranya: (a) Mts.S Ar-Ridho Tanjung Mulia memiliki guru yang rata rata S2 sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. (b) Memiliki sarana dan prasana yang cukup mendukung dari lapangan yang cukup luas dan lebar, juga di tambah lagi adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah.

5. Faktor pengambat dari terlaksananya efektivitas kegiatan pendidikan adalah a) minim nya pendanaan yang tersedia sehingga kebutuhan ats penuhan srana dan prasarana tertunda, b) SDM yang masih belum sesuai dengan keinginan sekolah artinya seluruh elemen dan birokrasi pendidikan harus senantiasa memperhatikan kekurangan dalam mewujudkan program program tang telah di rancang. Termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. c) kurang adanya dukungan dan keterlibatan pemerintah secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rusdiana, (2015) *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* Bandung, Pustaka Setia.
- A.R Tilaar, Ace Suryadi , (1994), *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Jakarta:
- Al quran an terjemahan ,al ankabut,29:2-3 Pustaka Al Kausar
- Alkaf Idrus H., (2003) *"Ihtisar hadits: Shahib Bukhari"*, Surabaya: Karya utama,
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Asmani, Jamal Ma'mur (2012) *"Tips Menjadi Kepala Sekolah Propesinal"* Jogjakarja Diva Press
- Asrul & Syafaruddin, (2014) *Manajemen Kepengawasan Pendidikan* Bandung: Citapustaka Media,
- Aswita Lubis Effi, (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Medan: UNIMED Press,
- Dasim Budimansyah, dan Ace Suryadi 2009 *Paradikma Pembangunan Pendidikan Nasional, Konsep, Teori, dan Aplikasi Dalam Analisis Kebijakan Publik* , (Bandung: Widya Aksara Press
- E ,Mulyasa , (2015) *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolahn* (Jakarta Bumi Aksara
- E. Mulyasa (2004) *Kurikulum Bebas Kompetensi ,Konsep Karakteristik, implementasi* Bandung Rosdakarya
- Engkoswara, 2015 *Administrasi pendidikan* Bandung, Alfabeta,
- Fadhli Muhammad 2017 jurnal Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Kota Bengkulu IAIN TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02,
- Fattah, Nanang 2012 *"Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan"*. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
- H.A.R. Tilaar, (1998), *Manajemen Pendidikan Nasional: kajian pendidikan masa depan*, Bandung Rosdakarya .
- HB, Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakrtu, UNS Press
- Helmawati, 2014 *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah /Madrasah Melalui Managerial Skills* (Jakarta: Reneka Cipta,
- Hidayat, Rahmad dan Wijaya Chandra 2017 *Ayat Ayat Al Quran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* Medan LPPPI,

- Hikmat, 2011 *Manajemen Pendidikan Bandung* CV Pustaka Setia
- Imron, Ali, 2008 *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk, dan Masa Depan* Jakarta, Bumi Aksara,
- Indah, Yuni 2016 *Kebijakan Sertifikasi, Kinerja, dan Kesejahteraan Guru* Yogyakarta, Deepublish
- M Hasbullah 2016 *Kebijakan Pendidikan dalam Perpektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* Jakarta Raja wali Pers,
- Muhaimin, dkk 2009., *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Mulyasa, 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Murni Veithzal Rivai, dan Sylviana, 2010 “*Education Management: Analisis Teori dan Praktik*” Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Nasution Inom, 2017 *Profesi Kependidikan* (Depok: Prenada Media Group,
- Nugroho Riant 2008 *Kebijakan Pendidikan yang Unggul* Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Nurhayati dan Fuad Matin, 2016 *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* Jakarta PT Raja Grafindo,
- P3M STAIN Tulungagung et.al, 2005 “*Ta’alum Jurnal Pendidikan Islam*”, Tulungagung, volume 28, Nomor
- Purwanto Ngalim, 1984 “*Administrasi Pendidikan*”, Jakarta: Mutiara, Refika Aditama
- Rohiat, 2008 *Kecerdasan emosional Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Bandung, PT
- Rohiat, *Manajemen Sekolah*, Bandung, Refika Aditama
- Sagala Syaiful, 2009 *Administrasi Pendidikan Kontemporer* Bandung, Alfabeta,
- Saifulloh Saifulloh Moh. 2012 *Jurnal Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah* (Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No. 2, November
- Salim, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Salim, 2018 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Ciptapustaka Media,
- Sani Ridwan Abullah dkk 2015 *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta Bumi Aksara,
- Sugiono, 2011 *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta,
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Syafaruddin & Asrul, 2015 *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media,
- Syafaruddin 2008 *Efektifitas Kebijakan Pendidikan :Konsep Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif* Jakarta, PT Rineka Cipta
- Thaiyibah Afifah dan Syafaruddin 2016 *Jurnal Tadbir: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* di Man 3 Medan, Vol.2 No.2 Juli Desember
- Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kota Kebumen IAINU Vol. 15 No. 1, Januari - Juni
- Uhar Suharsyaputra, 2010 *Adminstrasi Pendidikan* Bandung, PT Refika Aditama ,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Wasty Sumanto dan Hendayat Soetopo, *kepemimpinan dalam pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional,
- William N. Dunn, 1999 *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Gajah Mada
- Winarsih Sri 2017 *Jurnal Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan*
- Yogi Irfan Rosyadi dan Parrdjono, 2015 *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan : Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP I Cilawu Garut*, Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Rusyani Hikmatul Rosyad, Vl. 3 No .1Periode April
- Yusuf ,Rusli, 2009 *Landasan Pendidikan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press,
- Yusuf A. Muri 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group,